

PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH
(Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

Oleh:

AHMAD SYARIFUDIN, S.H.I

NIM: 1520310047

PEMBIMBING

DR. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.HuM

DR. FATHORRAHMAN, S.Sg.,M.Si

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah adakalanya mengalami kemacetan. Bank Syari'ah kemudian berupaya mengembalikan dana pihak ketiga (DPK) salah satunya dengan mempailitkan nasabah penerima pembiayaan ke Pengadilan Niaga dengan segala akibat hukumnya jika memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu memiliki minimal dua kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang, utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Salah satu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat ialah putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG. Karena yang terlibat di dalam putusan tersebut adalah pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi Syariah penelitian ini akan memfokuskan pada dua persoalan yaitu: *pertama*, apakah putusan pailit No.3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan prinsip syari'ah yang termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah? *Kedua*, secara umum bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi Syari'ah?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi hukum seperti buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syariah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dan juga untuk menjawab rumusan masalah bersifat deskriptif yakni peneliti menggambarkan putusan dan juga hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah: 1) Putusan perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak mempertimbangkan sama sekali hukum Islam yang dalam hal ini termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI. Namun bukan berarti putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan tidak terdapat perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang disyaratkan dalam undang-undang kepailitan dengan hukum Islam. 2) Secara umum pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi Syari'ah yaitu *pertama*, tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal pendaftaran perkara sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi syariah dan kepailitan pada umumnya karena menggunakan undang-undang yang sama. *Kedua*, tidak ada perbedaan secara prinsip antara syarat-syarat kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan Fatwa DSN-MUI khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci: putusan, kepailitan, ekonomi syari'ah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syarifudin, S.H.I.
NIM : 1520310047
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 April 2017
Saya yang menyatakan,



Ahmad Syarifudin, S.H.I
NIM. 1520310047

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Syarifudin, S.H.I.
NIM : 1520310047
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2017
Saya yang menyatakan,



Ahmad Syarifudin, S.H.I
NIM. 1520310047



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 230 /UIN.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas akhir dengan judul : **PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN**
EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan
No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **AHMAD SYARIFUDIN, S.H.I.**
Nomor Induk Mahasiswa : **1520310047**
Telah diujikan pada : **Rabu, 24 MEI 2017**
Nilai Ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syari'ah
(Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)
Nama : Ahmad Syarifudin, S.H.I
NIM : 1520310047
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah


telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

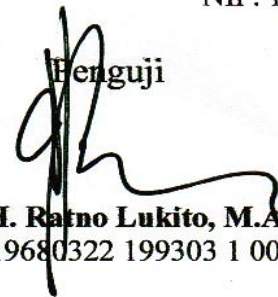
Ketua Sidang : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
Penguji I : Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
Penguji II : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

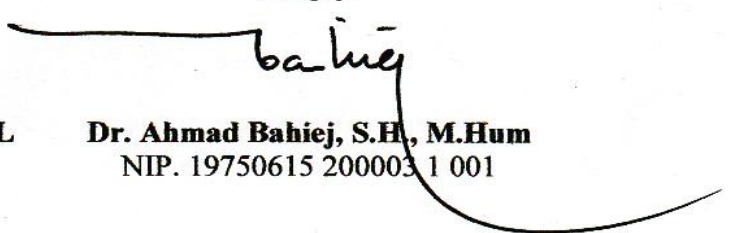
Diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2017

Waktu : 11.30 wib s/d 13.30
Hasil/ Nilai : 3.75
Predikat : Sangat Memuaskan

Ketua Sidang Pembimbing


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH
(Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)**

Yang ditulis oleh :

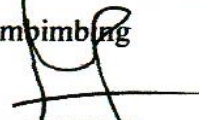
Nama : Ahmad Syarifudin, S.H.I
NIM : 1520310047
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 24 April 2017

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH
(Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG)**

Yang ditulis oleh:

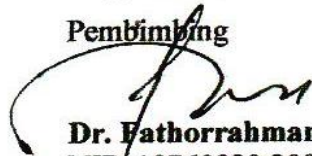
Nama : Ahmad Syarifudin, S.H.I
NIM : 1520310047
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 28 Januari 2017

Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Sg., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	a'		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a'		te (dengan titik dibawah)
ظ	a'		zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	kar mah al-auly '
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zak tul fi ri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	j hiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'
dammah + wawu mati فروض	ditulis	kar m
	ditulis	fur

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au
	ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'idat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur' n
القياس	ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Sam '
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	aw al-fur
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

*Buat emak **Soimah**, bapak **Tasirin**, mBak **Taslimah**, Kakak **Mustaqiem**, dan
Keponakan-Keponakan **Nur Laeli**, **Halimatu Sa'diyah**,
Delisa Mumtazah dan **M. Naufal**.
Juga Buat Ayah **Puji Raharjo Soekarno** dan **Bunda Mardhatillah Rahardjo**.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat dan kesempatan dari Allah Swt sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan magister dengan beragam pernik-pernik cobaan dan rintangannya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad Saw. Sang Revolusioner sejati serta untuk para sahabat dan keluarganya.

Setelah melewati beberapa tahapan akhirnya penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan di hadapan dewan penguji kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saran dan kritik sangat mewarnai tesis ini secara utuh dari awal hingga kesimpulan.

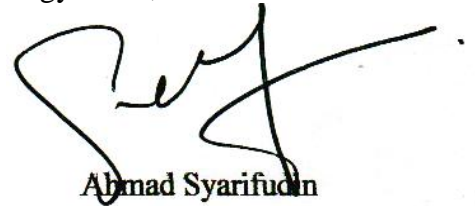
Untuk itu peneliti ucapan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku pembimbing I sekaligus ketua sidang.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, M.Ag selaku pembimbing II.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku penguji I pada sidang munaqosah.

6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku ketua prodi sekaligus penguji II.
7. Seluruh dosen dan segenap civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga serta rekan-rekan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015.

Akhirnya, sebelum menutup kata pengantar ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini. Tetapi tidak mengurangi harapan pribadi bahwa mudah-mudahan masih terdapat kemanfaatan di dalam penelitian ini baik bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2017



Ahmad Syarifudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING I	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN PERKARA

KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH23

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan di Indonesia23

1. Pengertian Kepailitan24

2. Dasar Hukum Kepailitan26

3. Asas-asas Hukum Kepailitan31

4. Syarat Mengajukan Permohonan Pailit36

5. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan41

6. Pernyataan Pailit43

B. Kepailitan dalam Pembiayaan Murabahah47

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah47

2. Dasar Hukum Murabahah49

3. Ketentuan-Ketentuan Utang dalam Pembiayaan Murabahah51

a. Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN No: 4/DSN-MUI/IV/200051

b. Saksi Menunda-Nunda Pembayaran dalam Fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/200054

c. Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005.55

d. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) Tagihan Murabahah dalam Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005.56

e. Konversi Akad Murabahah dalam Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005.....	56
4. Pailit dalam Pembiayaan Murabahah.....	58
C. Penyelesaian Kepailitan dalam Ekonomi Syariah	58
BAB III TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PAILIT NO. 3/PAILIT/2014/PN.SMG.....	64
A. Tinjauan Umum Putusan Pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG.....	64
B. Pemahaman Umum Hakim Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah	70
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM DAN PEMAHAMAN UMUM HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH	79
A. Pertimbangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG	79
1. Utang sebagai dasar kepailitan.....	80
2. Terdapat dua kreditor	83
3. Utang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.....	84
4. Restrukturisasi Pembiayaan	86
5. Risiko Musyarakah	93
B. Pemahaman Umum Hakim Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah.....	95

BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Terjemahan
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: Surat Keterangan <i>Research</i>
Lampiran 4	: Putusan No.3/Pailit/2014/PN.SMG
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Tesis
Lampiran 6	: Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya sistem ekonomi syari'ah di Indonesia memberikan harapan baru dalam upaya mendistribusikan kesejahteraan dan menghapuskan kesenjangan sosial (*social-gap*). Hal itu karena di dalam ekonomi syari'ah kegiatan atau usaha memenuhi kebutuhannya didasarkan pada prinsip syari'ah berpedoman pada al-Qur' n dan al-Hadis yang mencakup komersil dan non komersil¹, atau dalam term religius tidak hanya berdimensi keduniaan tetapi juga keakhiratan.

Salah satu pengamal terdepan ekonomi syari'ah di Indonesia ialah perbankan syari'ah² yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Berdirinya BMI disulut oleh kegelisahan kaum muslim Indonesia yang tengah berada pada titik kulminasi terhadap praktik perbankan yang mengandalkan bunga. Di Indonesia bunga bank telah dinyatakan haram melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*) sebagaimana terekam sebagai berikut:

“1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian,

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3.

²Selain bank syari'ah, kegiatan usaha yang berprinsip syari'ah juga termasuk lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah. Lihat Penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

praktek pembungaannya termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; 2) praktek pembungaannya tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.³

Perjalanan bank syari’ah sebagai motor utama ekonomi Syari’ah di Indonesia terus mengalami perkembangan.⁴ Salah satu indikatornya ialah bila didasarkan pada jumlah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syari’ah (*Individual Sharia Banking Network*) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik perbankan Syari’ah 2016. Menurut data OJK sampai dengan Desember tahun 2016 total KPO/KC, KCP/UPS, dan KK⁵ Bank Umum Syari’ah, Unit Usaha Syari’ah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yang masing-masing berjumlah 717 unit, 1.342 unit, dan 429 unit.⁶

Namun, sebagaimana halnya pada bank konvensional, bank syari’ah dalam menjalankan usahanya juga memiliki pelbagai risiko seperti: risiko pembiayaan (*finance risk*) pada bank konvensional disebut risiko kredit (*credit risk/default risk*); risiko investasi (*investment risk*); risiko likuidasi (*liquidity risk*); risiko

³Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 01 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/ Fa'idah*).

⁴ Perkembangan perbankan syari’ah Indonesia tidak terlepas dari dukungan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, tetapi juga pemerintah, regulasi perbankan, parlemen, dan para cendekiawan muslim yang ikut memuluskan perjalanan bank syari’ah itu sendiri. Lihat Rifki Islamil, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 1.

⁵KPO (Kantor Pusat Operasional), KC (Kantor Cabang), KCP (Kantor Cabang Pembantu), UPS (Unit Pelayanan Syari’ah), KK (Kantor Kas).

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syari’ah 2016”, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Volume 15 Nomor 01 Desember 2016.

operasional (*operational risk*); risiko penyelewengan (*fraud risk*); dan risiko fidusia (*fiduciary risk*).⁷

Pada pembiayaan misalnya bank berada pada risiko yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakmampuan nasabah penerima pembiayaan mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank beserta bagi hasil/margin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.⁸ Padahal, jamak diketahui bahwa dana yang dialirkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana milik pihak ketiga yang harus dikembalikan. Bahkan tidak hanya harus dikembalikan secara utuh, pada akad-akad selain *wadi'ah* (titipan) pihak ketiga dalam akad perjanjian awal juga berhak atas bagi hasil atau keuntungan bilamana dana yang disalurkan untuk pembiayaan mendapatkan bagian keuntungan (*profit sharing*) baik dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ataupun mudharabah.

Pembiayaan bermasalah yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet itulah selanjutnya bank melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana pihak ketiga dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan guna membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) utang-utangnya.⁹

⁷Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 40.

⁸*Ibid.*, hlm. 40-41.

⁹A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 447.

Kemudian apabila upaya penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi tidak berhasil bank akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan milik penerima pembiayaan yang diserahkan pada saat disepakatinya perjanjian pembiayaan. Adakalanya untuk mengembalikan dana pihak ketiga bank juga menempuh jalur litigasi dengan melakukan permohonan pailit debitor ke Pengadilan Niaga bila ternyata debitor memenuhi syarat untuk dipailitkan. Upaya pailit dilakukan apabila debitor wanprestasi baik karena tidak mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya (*insolvent*),¹⁰ atau karena memang tidak mau membayar (mengemplang).

Nasabah yang dinyatakan pailit maka terjadilah sita umum atas harta kekayaannya untuk kemudian berada pada kekuasaan kurator yang bertugas untuk membereskannya sekaligus membayarkan piutang bank.¹¹ Putusan pailit dari pengadilan membuat debitor tidak dapat menguasai, mengelola, baik menjual ataupun menggadaikan hartanya.¹²

Di antara upaya mempailitkan nasabah yang berhenti membayar dilakukan oleh PT Bank Syari'ah Bukopin atas Ny Hajjah Yudianti. PT Bank Syari'ah Bukopin yang berkedudukan dalam hukum sebagai kreditor memohonkan pailit Ny Hajjah Yudianti ke Pengadilan Niaga Semarang yang kemudian dikabulkan pada tanggal 17 April 2014 dengan putusan No. 3/Pailit/2014/PN.SMG. Atas dasar putusan pailit tersebut secara yuridis debitor pailit tidak dapat melakukan

¹⁰M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1

¹¹Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. Ke-7*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 121.

perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya kecuali yang ditentukan lain di dalam undang-undang.¹³

Hubungan hukum di antara pemohon dan termohon bermula saat Ny Hajjah Yudiarti bertindak atas nama orang perorangan menandatangani pembiayaan murabahah kepada pemohon pailit dengan platform pembiayaan murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKS/VIII/2012 nominal Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*) dengan margin Rp. 1.049.628.840,- (*satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan sejak tanggal penarikan/sampai tanggal 15-08-2017.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh kedua pihak di atas, menempatkan PT. Bank Syari'ah Bukopin sebagai penjual yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh Ny Hajjah Yudianti selaku nasabah pemohon pembiayaan dengan memberikan informasi secara terbuka harga pokok barang ditambah dengan margin yang ditentukan sekaligus disepakati keduanya.¹⁴

¹³Pengecualian terhadap harta debitor terdapat pada Pasal 22a, 22b, 22c Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya hanya akan disebut UU Kepailitan dan PKPU), yaitu:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar diutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

¹⁴Secara teoritik pembiayaan murabahah merupakan aktivitas menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Ny Hajjah Yudianti dapat dinyatakan pailit karena beberapa persyaratan pailit menurut undang-undang telah terpenuhi yaitu:¹⁵ 1) memiliki sedikitnya dua kreditor; 2) tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; dan 3) utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Terpenuhinya syarat-syarat pailit serta didukung oleh pembuktian syarat secara sederhana membuat permohonan pailit harus dikabulkan sebagaimana amanah Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.¹⁶

Adapun yang perlu dicermati atas putusan tersebut ialah bahwa bentuk kerjasama antara debitor pailit dan kreditor adalah pembiayaan murabahah. Di dalam Pasal 19 yang berisi tentang ketentuan kegiatan Bank Umum Syari’ah (BUS) sebagaimana Bank Syari’ah Bukopin menyebutkan bahwa kegiatan bank Syari’ah salah satunya ialah dengan “...d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.”

Berdasarkan pengertiannya prinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh

¹⁵Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

¹⁶Di dalam peraturan kepailitan yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang ketentuan ini dimuat di dalam Pasal 6 ayat (3).

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.¹⁷ Prinsip syari'ah dalam kegiatan bank difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁸ Lebih jelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa, "Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." Dengan demikian, di dalam memutuskan pailit Pengadilan Niaga juga harus mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah karena menyangkut prinsip syari'ah itu sendiri.

Di dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah misalnya telah diatur beberapa ketentuan mulai dari ketentuan umum murabahah untuk pihak bank dan ketentuan pembiayaan untuk nasabah pemohon. Fatwa *a quo* juga mengatur perihal penyelesaian utang-piutang dalam pembiayaan murabahah dan kondisi nasabah pailit.

Nasabah yang menerima pembiayaan murabahah dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tidak dibenarkan untuk menunda-nunda pembayaran. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

Lebih lanjut di dalam fatwa DSN MUI tersebut juga telah mengatur perihal bangkrut atau pailit, yaitu: "Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal

¹⁷Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syari'ah.

¹⁸Lihat Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syari'ah.

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.

Setidaknya terdapat tujuh fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah yang memuat tentang ketentuan pembiayaan guna menjamin pembiayaan murabahah tetap sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan tentu saja wajib dipertimbangkan dalam mengadili perkara kepailitan, yaitu:

- 1) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- 2) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- 3) Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran;
- 4) Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*);
- 5) Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;
- 6) Fatwa DSN. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
- 7) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah;

Dari pemaparan di atas menarik untuk diteliti tentang: *Pertama*, sejauh mana hakim mempertimbangan ketentuan-ketentuan kepailitan di dalam ekonomi syari’ah yang dalam hal ini ialah fatwa-fatwa Dewan DSN yang terkait dengan Murabahah dalam putusan pailit No.3/Pailit/2014/PN.Smg. *Kedua*, karena

kepailitan ekonomi syari'ah merupakan persoalan kontemporer dan tidak terdapat ketentuan di dalam UU Kepailitan dan PKPU apakah pemahaman secara umum hakim Pengadilan Niaga dalam perkara penyelesaian kepailitan ekonomi syariah.

Putusan pailit No.3/PAILIT/2014/PN.SMG dipilih sebagai bahan penelitian ialah dikarenakan perkaranya bermula pada pembiayaan berplatform murabahah yang merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Bank Syariah, selain juga merupakan perkara kepailitan terbaru selama kurun waktu 3 tahun terakhir yang melibatkan bank syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini akan berfokus pada dua hal yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah yang termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah?
2. Secara umum bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan-pertimbangan prinsip syari'ah di dalam putusan perkara pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman umum hakim hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya dalam dua aspek teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan rujukan pada pengembangan riset lanjutan yang berkaitan dengan objek kajian hukum kepailitan ekonomi syari'ah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan reflektif bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada ekonomi syari'ah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang meletakkan hukum kepailitan ekonomi syari'ah sebagai objek riset masih terbilang langka. Berdasarkan penelusuran ditemukan beberapa

penelitian yang perlu dipertimbangkan karena memilih objek kajian yang sama yaitu tentang kepailitan ekonomi Syari'ah.

Penelitian pertama berjudul *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syari'ah*¹⁹ yang ditulis oleh Erna Widjajati. Di dalamnya peneliti mengkaji putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register No. 7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat yang mengadili perkara kepailitan atas perseroan yang melakukan pembiayaan musyarakah dan juga terhadap putusan Mahkamah Agung No. 346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga tersebut.

Penelitian tersebut menguraikan setidaknya dua poin permasalahannya yaitu apakah Pengadilan Niaga Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa kepailitan ekonomi syari'ah, kemudian bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya No. 346 K/PDT.SUS/2011.

Di dalam temuan penelitian tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang memutus sengketa kepailitan ekonomi syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Begitu pula di dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili ekonomi syari'ah.

¹⁹Erna Widjajati, "Penyelesaian Sengket Kepailitan Hukum Perbankan Syari'ah", *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XV, No. 1 Januari 2015.

Penelitian selanjutnya yaitu “Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syari’ah”.²⁰ Di dalam artikel tersebut Yudha Indrapraja memfokuskan kajiannya pada beberapa hal. Salah satu yang bertaut dengan masalah penyelesaian sengketa kepailitan syari’ah ialah bagaimana penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syari’ah.

Di akhir risetnya Yudha Indrapraja berkesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kepailitan sepatutnya berada pada Pengadilan Agama sebagaimana amanah Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Juga termasuk Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Judul penelitian selanjutnya ialah “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah” yang merupakan penelitian Syamsudi Manan Sinaga.²¹ Syamsudi memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian sengketa dalam Sistem Ekonomi Syari’ah melalui arbitrase dan kepailitan yang menghasilkan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kepailitan di bidang ekonomi syari’ah dapat diselesaikan melalui non litigasi yaitu arbitrase dan melalui litigasi yaitu Pengadilan Agama.

²⁰Yudha Indrapraja, “Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Asy-Syari’ah: Jurnal Studi Ilmu Kesyari’ahan di Indonesia*, Vol. 16, No. 3 Desember 2014.

²¹Syamsudi Manan Sinaga, “Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari’ah” dalam www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mhn070111.pdf diakses pada tanggal 17-11-2016.

Perihal penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Agama, hal tersebut berangkat dari Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang secara jelas menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama memungkinkan pembentukan pengadilan khusus dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Meskipun Pengadilan Niaga belum terbentuk di lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama dapat menggunakan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengadili sengketa utang piutang kepailitan ekonomi syari'ah.

Demikian halnya dengan pendapat Darul Humrah²² menurutnya secara litigasi penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari'ah harus diputus di Pengadilan Agama karena menurutnya penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari'ah di Pengadilan Niaga telah merusak dan/atau menciderai undang-undang perbankan syari'ah. Penelitian tersebut melakukan penilaian terhadap Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, dan Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa semua penelitian terdahulu membahas mengenai kompetensi Pengadilan Niaga, yaitu apakah Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syari'ah. Fokus penelitian tersebutlah yang membedakannya dengan penelitian ini.

Di dalam riset ini peneliti memfokuskan pada persoalan pertimbangan ekonomi syari'ah yang bertolak dari putusan pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG

²²Darul Humrah, "Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.

serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menggunakan UU Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan perkara pailit yang subjek hukumnya tunduk pada hukum ekonomi syari'ah. Hal ini penting untuk melihat bagaimana pengadilan niaga yang tugasnya menyatakan pailit perseorangan atau perseroan dengan pembuktian utang yang sederhana memposisikan perkara kepailitan yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syari'ah, khususnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

E. Kerangka Teoretik

Di dalam mengkaji hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia dihadapkan pada realitas bahwa sistem hukum Islam yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia telah tampak pada diakuinya beberapa sistem hukum misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Sistem hukum adat misalnya disebutkan di dalam Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”²³.

²³ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Sedangkan sistem hukum Islam dijamin di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴

Dasar negara itulah menurut Afdol yang menyebabkan dapat ditemukannya aturan-aturan yang berlandaskan kepada hukum agama di Indonesia. Misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum waris yang banyak bersandar pada hukum Islam.²⁵ Dengan demikian hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, namun Indonesia bukanlah negara berdasarkan pada satu agama, melainkan mengakui agama-agama yang lain dan menjamin hak-hak warganya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.²⁶

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam pengertiannya merupakan suatu konsep yang menunjukkan suatu kondisi bahwa terdapat lebih dari satu sistem atau institusi hukum yang ada dan berlaku secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat.²⁷

Hooker sebagaimana yang dikutip oleh Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum dengan:

²⁴Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁵Afdol, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 220.

²⁶*Ibid.*, hlm. 221

²⁷Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: MuMa, 2010), hlm. 61.

*“...legal pluralism as the existence of “multiple system of legal obligation...within the confines of the state”.*²⁸

Pada dasarnya pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan kritik terhadap ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*) yang menjadikan hukum negara berlaku seragam untuk semua orang yang berada di wilayah kekuasaan negara. Artinya di dalam sentralisme hukum hanya ada satu hukum di dalam negara yaitu hukum yang dibuat oleh negara.²⁹

Berbanding terbalik dengan pluralisme hukum yang diakui oleh negara dan diakomodir keberadaannya. Namun Griffiths di dalam melakukan kajian terhadap pluralisme hukum membaginya menjadi dua yaitu pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) menurut Griffiths merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (*legal centralism*). Pada pluralisme hukum lemah ini negara mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum yang dibuat oleh negara tetap dipandang lebih berkuasa dibandingkan dengan sistem hukum yang lain di dalam hierarki sistem hukum negara.³⁰

Sedangkan pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) merupakan antitesis dari pluralisme hukum lemah yang mengacu pada fakta adanya kemajemukan yang diakui di dalam tatanan hukum di dalam kelompok

²⁸Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” dalam www.commission-on-legal-pluralism.com diakses pada tanggal 27 Mei 2017

²⁹M. Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3, No. 1, Juni 2014.

³⁰I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Makalah, dalam www.huma.or.id diakses pada tanggal 27-05-2017.

masyarakat. Lebih dari itu, pada pluralisme hukum kuat tidak menempatkan sistem hukum lain berada di posisi bawah sistem yang dibuat oleh negara dalam hierarki sistem negara.³¹

Selain itu teori *semi-Autonomous Social Field* juga dimasukkan ke dalam jenis pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) yang memberikan pemahaman bahwa legal pluralisme tidak hanya sebatas hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja namun termasuk juga di dalamnya sistem normatif berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri.³²

Di dalam Institusi sosial yang semi otonom hukum juga dapat berjalan efektif sebagai bentuk dari pemaksaan sosial selain dari institusi hukum formal. Hal ini karena di dalam berbagai institusi sosial yang semi otonom telah memperlihatkan bahwa mereka memiliki aturan untuk membujuk atau memaksa para anggotanya yang taat. Telah terbukti bahwa hukum lokal, adat kebiasaan, dan hukum agama menjadi beberapa faktor utama bagi keefektifan hukum di dalam kehidupan masyarakat modern.³³

F. Metode Penelitian

Setelah memahami latar belakang yang telah diuraikan di atas, langkah selanjutnya ialah menetapkan metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam riset ini. khususnya berkaitan dengan persoalan penyelesaian perkara

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws: a Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 8.

kepailitan ekonomi syari'ah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang dalam pengertiannya digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi³⁴. Adapun persoalan yang tengah dihadapi ialah berkaitan dengan penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Pengadilan Niaga yang pokok permasalahannya telah dipaparkan di dalam sub perumusan masalah sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵ Dalam penelitian ini pendekatannya menggunakan kasus perkara kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang yaitu

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

³⁵*Ibid.*, hlm. 137

putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahan Hukum

Terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan di dalam meneliti penyelesaian perkara ekonomi syari'ah platform murabahah ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁶

Dalam konteks penelitian ini maka bahan hukum primernya berupa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta putusan pailit No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syari'ah.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 181

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan di dalam penelitian ini ialah dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen berupa putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG, peraturan perundang-undangan, dan berbagai penelitian serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna menggali informasi khususnya pada fokus permasalahan yang kedua yaitu tantangan hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan Ekonomi Syari'ah.

Wawancara tersebut dilakukan pada Hakim Niaga Semarang.

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder melalui dokumentasi dan wawancara maka teknik selanjutnya ialah melakukan analisis. Analisis diperlukan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁷ Adapun sifat analisis yang akan digunakan di dalam analisis ini ialah deskriptif yaitu peneliti akan menggambarkan atau memaparkan objek kajian yang diteliti.

³⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 183.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang baik sangat diperlukan guna membentuk sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis. Oleh sebab itu di dalam karya ilmiah ini penulisannya akan dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian, dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengurai tinjauan umum tentang penyelesaian kepailitan pada umumnya dan penyelesaian kepailitan ekonomi syari'ah. Kepailitan dalam hukum positif yang digunakan di Indonesia atau pada umumnya dibahas definisi, dasar hukum, asas-asas, syarat mengajukan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan ke pengadilan dan akibat hukum dari permohonan pailit yang dikabulkan oleh pengadilan. Adapun dalam pembahasan kepailitan ekonomi syari'ah yang merupakan akibat dari pembiayaan murabahah dibahas tentang pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum murabahah, dan ketentuan-ketentuan utang dalam pembiayaan murabah. Poin terakhir dalam bab ini membahas penyelesaian kepailitan ekonomi syari'ah di Indonesia yang terkait langsung dengan objek penelitian ini.

Bab Ketiga, karena penelitian ini mencoba menganalisis terhadap putusan kepailitan No.3/Pailit/2014/PN.SMG maka di dalam bab tiga dibahas tentang

putusan tersebut secara umum. Pada bab ini khususnya sub judul kedua berisi tentang uraian persoalan utama hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syari'ah yang diperoleh melalui wawancara, dilengkapi dengan bahan hukum lain baik berkategori bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi pokok pembahasan dari permasalahan penelitian yang disuguhkan pada bab pertama. Bab keempat mencoba menganalisis tentang pertimbangan hukum Islam di dalam putusan pailit No.3/Pailit/2014/PN.SMG dan juga menganalisis tentang persoalan utama hakim niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syari'ah yang melibatkan pihak yang tunduk pada hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian atau jawaban atas persoalan yang telah diterangkan pada bab I. Bab ini juga berisikan saran-saran yang mungkin diperlukan pada penelitian lanjutan pada objek kajian kepailitan ekonomi syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Putusan perkara kepailitan No. 3/Pailit/2014/PN.SMG hakim sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan fatwa DSN-MUI di dalam dasar pertimbangan diputuskannya perkara pailit ataupun hukum Islam yang termanifestasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Meski demikian bukan berarti putusan tersebut menjadi cacat dan tidak sesuai dengan syari'ah. Peneliti melihat bahwa meskipun tidak menyebut fatwa DSN-MUI dan KHES secara gamblang, namun putusan pailit No. 3/Pailit/2014/PN.SMG tidak bertentangan sama sekali dengan keduanya. Karena yang demikian itu terlihat dari konsep utang, debitor, kreditor, adanya restrukturisasi, yang disyaratkan di dalam UU Kepailitan dan PKPU juga dicantumkan ketentuannya di dalam hukum Islam, dan tidak ada perbedaan yang sangat prinsip di antara keduanya. Maka, sebenarnya tidak ada beban bagi hakim untuk menyebutkan secara eksplisit hukum Islam yang terwujud dalam fatwa DSN-MUI. Terlebih di dalam fatwa tidak diperinci dan bahkan tidak mengatur bagaimana mekanisme kepailitan harus dilaksanakan.
2. Secara umum pemahaman hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syari'ah ialah sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan dari proses pendaftaran perkara sampai diputusnya pailit debitor oleh pengadilan niaga antara perkara kepailitan pada umumnya dengan perkara kepailitan ekonomi syariah. Hal ini tidak lain karena di dalam penyelesaian perkara kepailitan keduanya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sama yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Di dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi syariah hakim niaga menilai bahwa tidak ada perbedaan secara prinsip mengenai syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan hukum Islam yang termanifestasi di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Syarat kepailitan dimaksud yaitu tentang minimal memiliki dua kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang, dan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

B. Saran

Para peneliti maupun akademisi yang bersikukuh agar pengadilan kepailitan ekonomi syariah berada di dalam lingkungan Peradilan Agama diharapkan melakukan penelitian tentang putusan-putusan kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada hukum ekonomi syariah guna mengetahui seberapa tinggi kadar urgensi pemindahan kewenangan Pengadilan Niaga ke Pengadilan Agama.

Pemindahan kekuasaan Pengadilan Niaga ke Pengadilan Agama tidak mudah, selain juga tidak murah. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama juga akan menjadi penghalang sekaligus tantangan mengingat dalam menyelesaikan perkara kepailitan dibutuhkan hakim-hakim yang kompeten di dalam kepailitan disamping pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Agama RI, Kementerian, *al-Quran dan Terjemahan Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, Bandung: Syaamil Quran, 2011.

B. Hadis

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, “Kitab Fil Istiqr ”, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1999.

at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, “Kitab al-A kam”, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattaui’, 2008.

Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, “Kitab at-Tij r t”, Beirut: D r al-Fikr, t.t., III: 29.

Sunan An-Nasa’I, Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr, “Kitab al-Buyu’”, Riy : Maktabah al-Ma’ rif Linasyri Wa at-Tawzi’, 1998.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, Ed. 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, (2008), hlm. 26

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hasan Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar’iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Humrah, Darul, “Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga terhadap Perkara Kepailitan dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.

- Indrapraja, Yudha, *Kegagalan Hukum Di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah*, Jurnal As-Syari'ah Vol. 16, No. 3 Desember 2014.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Islamil, Rifki, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Manan Sinaga, Syamsudi "Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah" dalam www.perpustakaan.bphn.go.id/laras/index.php/searchkatalog/.../41282/mhn070111.pdf diakses pada tanggal 17-11-2016
- Mukti Arto, A, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muttaqien, Dadan, dan Cikman, Fakhruddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah 2016*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Volume 15 Nomor 01 Desember 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sri Imaniyati, Neni, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
- Syamsul Anwar, *Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM Books, 2007.
- Wangsawidjaja Z, A., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Widjajati, Erna, *Penyelesaian Sengket Kepailitan Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal al-Ahkam Vol. XV, No. 1 Januari 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 01 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).

Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. Lain-lain

Afdol, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, dalam Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

Akbar Silondae, Arus, dan B. Ilyas, Wirawan, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta Salemba Empat, 2011.

Djumaldi, F.X., *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

F. Lusk, Harold, *Business Law: Principles and Cases*, Homewood Illinois: 1986.

Fajar ND, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” dalam www.commission-on-legal-pluralism.com diakses pada tanggal 27 Mei 2017.
- Hadi Shubhan, M., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2012.
- Himawan, Charles, *Hukum Kepailitan atau Kepailitan Hukum...dalam Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Hukum Online, “Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan” dalam www.hukumonline.com diakses pada tanggal 17-04-2017.
- Misbahul Mujib, M, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3, No. 1, Juni 2014.
- Nurjaya, I Nyoman “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Makalah, dalam www.huma.or.id diakses pada tanggal 27-05-2017.
- Kamus Bank Indonesia, “Kreditur”, dalam <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=K> diakses tanggal 11 April 2017.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Lukito, Ratno, *Sacred and Secular Laws: a Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. Ke-7*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibyo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Sutedi, Andrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Wawancara dengan Bapak Pujo Unggul selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 30 Maret 2017.

Warman, Kurnia, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: MuMa, 2010.

Lampiran 1: Terjemahan

TERJEMAHAN

No	Halaman	Bab II
1	50	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
2	50	“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
3	50	Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."
3	50-51	“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.
4	51	“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.
5	51	Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia

		mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".
6	51	Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya."

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Sengketa ekonomi Syariah diselesaikan di Peradilan Agama, sebagai hakim bagaimana pendapat bapak?
2. Perkara kepailitan termasuk perkara permohonan (*voluntair*), untuk subjek hukum yang tunduk pada ekonomi syariah apa perlu diselesaikan di Pengadilan Agama atau tetap di Pengadilan Niaga?
3. Apakah terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah dengan kepailitan pada umumnya, baik prosedur ataupun dalam proses hakim melakukan pertimbangan hukumnya?
4. Apakah di dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan subjek hukum yang tunduk pada hukum ekonomi syariah perlu mempertimbangkan hukum Islam (fatwa DSN-MUI atau KHES).
5. Secara umum bagaimana pendapat bapak dalam penyelesaian perkara kepailitan ekonomi Syari'ah?

**PENGADILAN NEGERI / NIAGA SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

SEMARANG - 50148

Nomor : 38/Rst/2017
Lampiran : --
Perihal : Surat Keterangan
Research. -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga Semarang selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : AHMAD SYARIFUDIN
NIM : 15203100047
Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri / Niaga Semarang mulai tanggal, 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 sehubungan dengan penyusunan Diserrtasi mengenai :

“ Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Perkara Pailit NO.3.PAILIT/2014/PN.SMG)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 22 Maret 2017

An Ketua PENGADILAN NEGERI / NIAGA SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L,



P U T U S A N

Nomor. 03/ Pailit /2014/ PN.Niaga. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.

55, Jakarta 10440, dalam hal ini memilih domisili hukum di

Kantor Kuasanya bernama : Purwoko J. Soemantri, SH, M.

Hum, Iwan Natapriyana, SH, Abdullah, SH., La Ode

Syahrudin, SH dan Adhytia Dwi Prasetyo, SH, yang bertindak

baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, kesemuanya

Advokat pada Kantor Advokat PURWOKO J. SOEMANTRI, SH

& REKAN, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV,

Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jl. Jend. Gatot Soebroto,

Senayan, Jakarta-10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

tertanggal 26 November 2013, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pailit;

T e r h a d a p :

NY. HAJJAH YUDIANTI, beralamat di Ngrejopuro RT. 01/003 Jl. Raya

Slogohimo Wonogiri, JawaTengah, selanjutnya disebut

Termohon Pailit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;

Setelah memperhatikan bukti tertulis kedua belah pihak dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit sebagaimana didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam Register Nomor : 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tertanggal 19 Pebruari 2014 dengan dalil permohonan Pernyataan Pailit yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMOHON :

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah dengan produk usaha antara lain : simpanan tabungan syariah, penyaluran fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk syariah, khususnya kepada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha di Indonesia dan perorangan ;

B. IDENTITAS TERMOHON :

2. Bahwa TERMOHON adalah orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja ;

C. TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :

3. Bahwa sehubungan dengan bidang usaha Termohon tersebut diatas, maka antara Pemohon dengan Termohon yang dalam tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari Suaminya : Haji Mujiono Rachmat, telah terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon , sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, berdasarkan Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46, Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puluh sembilan juta

enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan harga jual maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- (empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 (enam puluh enam) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta;

Bahwa untuk kepastian menjamin ketertiban pembayaran lunas hutang Termohon/Debitur tepat pada waktunya, Termohon/Debitur telah memberikan jaminan kepada Pemohon : Kreditur berupa :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, seluas 1.454 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-09-2006 No. 00011/Sendang/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Sendang, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 309.700.000.- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 349/Klunggen, seluas 2.250 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-06-1979 No. 213/D/79, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Klunggen, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani Hak Tanggungan

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2146/Wuryorejo, seluas 1.731 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-01-2003 No. 00077/2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Wuryorejo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3197/Giripurwo, seluas 397 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-11-2006 No. 00086/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3336/Giripurwo, seluas 247 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 23-06-2008 No. 00072/2008, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan ;

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1874/Purwosari, seluas 1.001 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 08-03-2004 No. 00086/2004, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Purwosari, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan

tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 421.504.926.- (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2013/Sidoharjo, seluas 310 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 30-08-2000 No. 00056/2000, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa / Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama Sri Yudianti, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1024/Sidohardjo, seluas 725 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-12-1991 No. 16749/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/ Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono, demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan tujuan serta ketentuan undang-undang dianggap sebagai harta tetap tidak ada yang dikecualikan, yang akan dibebani hak tanggungan peringkat II dengan nilai pembebanan sebesar Rp. 361.000.000.- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1486/Slogohimo, seluas 1.447 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-11-2006 No. 00020/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan

Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pencairan Pembiayaan Murabahah menjadi fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian persediaan (stock) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Kemudian dipertegas kembali berdasarkan Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal /penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp. 147.256.274.- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan Al Musyarakah dari Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan (stock) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Selanjutnya bertalian dengan hutang Ny. Hajjah Yudianti : Termohon, Haji Mujiono Rachmat telah pula menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara Personal Garansi sesuai Akta Personal Garansi No. 205

tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. ;

Kemudian berdasarkan Akta No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, telah diadakan Perubahan Jaminan Fiducia dari nama Nasabah : Tuan H. Mujiono Rachmat menjadi tuan Haji Mujiono Rachmat dan Ny. Yudianti, dengan obyek jaminan fiducia yang terdiri dari : persediaan barang dagangan senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

6. Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad Musyarakah, Termohon tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

No	No Rekening	Kategori	Nama	Outstanding	Baki debit per	Tunggakan	Keterangan
1	3560000407	Musyarakah	Yudianti, Hj	3.000.000.000,00	2.852.743.726,00	0 93.599.303	<p>- Saldo Debit direstrukturisasi atas pembiayaan yang ada (karena telah macet).</p> <p>- Menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014.</p>

Karenanya kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 :

OTS per November 2013

- Rp. 2.852.743.726.-

- a. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini.
- b. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
- m.

Pasal 11 Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21 / ADD – MSKH / BSB – SKA / VII / 2003 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- * Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :
- 1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pasal 9 Akta Marabahah No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKS/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;

2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pasal 11 Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah No. 204 tanggal 22 Juli 2013 , yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

* Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad, Bank berhak untuk menuntut / menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

1. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini, atau ;
2. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank atau ;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
 10.
 11.
 12.
 13.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan on the spot ke lapangan, usaha dari Termohon kenyataan sudah tidak ada lagi (mati), sehingga sumber payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi , begitupun Termohon sudah tidak ada itikad mau membayar kewajibannya kepada Pemohon ;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas utang yang ada sehubungan fasilitas pembiayaan secara hukum telah jatuh waktu dan ditagih. Untuk itu Pemohon telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari win-win solution penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dan juga telah menyampaikan Surat Peringatan antara lain sebagai berikut:
- 9.1. Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;
 - 9.2. Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
 - 9.3. Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
 - 9.4. Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 B/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan;
 - 9.5. Somasi /Teguran, Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
 - 9.6. Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;

1. Bahwa Jaminan melekat pada akta perjanjiannya. Oleh karena itu tidak mungkin dua atau lebih akta perjanjian perbankan terjadi jaminan yang sama;
2. Bahwa antara Akta, Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor 02 / Pailit/2014 PN.SMG (vide : halaman 2 - 4, Nomor: 3.1) DENGAN Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG (vide : halaman 3 - 7, Nomor: 3.1) memiliki atau. terdapat 21 (dua, puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
3. Bahwa sedangkan antara Akta, Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor 02 / Pailit/2014 PN.SMG (vide : halaman 7, Nomor: 6.1 dan 6.2) DENGAN Akta, Akad Line. facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor 03 / Pailit/2014 PN.SMG (vide : halaman 2 - 3, Nomor: 3.1 point 1 dan 2) juga memiliki atau terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN;
4. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur (Obscure) dan Rancu (Ambigu);
5. Bahwa Akad Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Vide : Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000);
6. Bahwa Kerugian atas Akad Musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal;
7. Bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah;

8. Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan;
9. Bahwa yang terjadi PEMOHON hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah;
10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan : "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya". Penjelasan Ayat (4);
11. Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.
12. Bahwa TERMOHON masih memiliki kewajiban di dalam Ketenagakerjaan TERMOHON masih memiliki kewajiban atau hutang terhadap Upah Karyawan TERMOHON sejumlah 110 (seratus sepuluh) Karyawan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang wajib dan harus didahulukan pembayarannya daripada hutang lainnya;

Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan putusan :

"Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima" (Niet on Van Kelijke Verklarcht)

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan. Niaga Pada Pengadilan. Negeri Semarang melalui Majelis Hakim Berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Kuasa Pemohon telah diajukan bukti surat, berupa fotocopy :

1. P – 1 Akta Pendirian Perseroan PT. Bank Swansarindo International No. 102, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) - Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Nopember 1990 Nomor 92 ;
2. P – 1a Berita Acara Rapat PT Swansarindo Internasional, Akta No. 159 tertanggal 16 Desember 1998 , antara lain tentang Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995, Notaris R. Johannes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta ;
3. P – 1b Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swansarindo Internasional, Akta No. 27, tertanggal 6 Februari 2002, Notaris H. Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta , tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara menjadi Perseroan ini bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia ;
4. P – 1c Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusi RI Nomor AHU-22464.AH.01.02 tahun 2008 dan telah diumumkan didalam Berita Negara RI – Tambahan Berita Negara RI tanggal 15 Juli 2008 Nomor 57 tentang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Bukopin dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Persyarikatan Indonesia, Akta No. 28, tertanggal 31 Maret 2008, Notaris Adrian Djuaini, SH., Notaris di Jakarta ;
5. P – 1d Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin, Tbk. No. 18, tanggal 18 Juni 2009 dibuat dihadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris di Jakarta ;

Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;

14. P – 2g Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 222/Tunggur, seluas ± 900 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 03-08-1991 No. 11025/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Tunggur, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono ;
15. P – 2h Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1256/Bulusari, seluas 145 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 14-11-2001 No. 00032/2001, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Bulusari, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
16. P – 2i Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1237/Soco, seluas ± 790 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 25-05-1993 No. 6225/1993, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Soco, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
17. P – 2j Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1461/Waru, seluas 119 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 10-09-1998 No. 00219/7507/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Waru, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
18. P – 2k Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2146/Wuryorejo, seluas 1.731 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-01-2003 No. 00077/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Wuryorejo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
19. P – 2l Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3197/Giripurwo, seluas 397 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-11-2006 No. 00086/2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;

20. P – 2m Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3336/Giripurwo, seluas 247 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 23-06-2008 No. 00072/2008, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kelurahan Giripurwo , terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;
21. P – 2n Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1874/Purwosari, seluas 1.001 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 08-03-2004 No. 00086/2004, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Desa Purwosari, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
22. P – 2o Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2013/Sidoharjo, seluas 310 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 30-08-2000 No. 00056/2000, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
23. P – 2p Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1024/Sidoharjo, seluas 725 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 09-12-1991 No. 16749/1991, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Sidoharjo, Desa/ Kelurahan Sidoharjo, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
24. P – 2q Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1486/Slogohimo, seluas 1.447 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 07-11-2006 No. 00020/ 2006, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa Slogohimo, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
25. P – 2r Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 162/Slogohimo, seluas ± 285 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 17-09-1987 No. 8537/ 1987, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;

26. P – 2s Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1191/Slogohimo, seluas ± 139 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 11-06-2003 No. 00067/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Slogohimo, Desa/Kelurahan Slogohimo, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti ;
27. P – 2t Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1247/Ngadirojo Kidul, seluas 720 M2 sesuai Gambar Situasi tanggal 28-01-1989 No. 2089/1989, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
28. P – 2u Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2439/Pandeyan, seluas ± 330 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 24-11-1998 No. 00343/ 8717/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Jatisono, Desa Pandeyan, terdaftar atas nama Hajah Sri Yudianti ;
29. P – 2v Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2541/Ngesrep, seluas 240 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 17-09-2003 No. 34/Ngesrep/ 2003, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa/Kelurahan Ngesrep, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
30. P – 2w Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 854/Nguter, seluas 446 M2 sesuai Surat Ukur tanggal 29-07-1982 No. 6570/1982, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Desa/Kelurahan Nguter, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
31. P – 2x Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia ;
32. P – 2y Akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta ;

33. P – 2z Akta Personal Garansi No. 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. ;
34. P – 2aa Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 15 Agustus 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sebagai pinjaman ;
35. P – 2bb Bukti Rekening Giro No. Rekening 88004509107 atas nama Yudianti, HJ / Termohon periode 08-2012 ;
36. P – 3 Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/III/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan jangka waktu sampai 60 bulan / sampai 15-08-2017 ;
37. P – 4 Akta Akad Line facility No. 47, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta;
38. P – 4a Akta Pengakuan Hutang No. 48, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta ;
39. P – 5 Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn.,
40. P – 5a Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran (Repayment Schedule) tanggal 31 Januari 2013 No. 036/BIS/BSB-JKT/II/2013 ;
41. P – 6 Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;

42. P – 7 Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn. ;
43. P – 7a Surat tanggal 26 April 2003 mengenai Permohonan Restruktur Pembiayaan ;
44. P – 7b Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan tanggal 29 Mei 2013 No. 149/BIS/BSB-JKT/VI/2013 ;
45. P – 8 Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 ;
46. P – 8a Surat Keterangan satu nama No. : 474.4/67 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Slogohimo ;
47. P – 9 Posisi Outstanding per 31 Januari 2014 , menunggu bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 , Januari 2014 , posisinya sebagai berikut :
48. P - 9a Posisi Outstanding per 28 Pebruari 2014, menunggu bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 , Januari 2014, Pebruari 2014 ;
49. P– 9b Surat Sanggup tanggal 15 Agustus 2012 sejumlah uang Rp. 3.000.000.000 .- ;
50. P– 9c Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 2.852.743.726 .- ;
51. P– 9d Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 2.852.743.726.;
52. P – 10 Surat Peringatan I No. 038/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;
53. P – 10a Surat Peringatan II No. 123/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;

54. P – 10b Surat Peringatan III No. 227/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
55. P – 10c Surat Pembentahan Stock Opname No. 270B/SKA/BSB/ VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan ;
56. P – 10d Somasi / Teguran, Surat No. 146/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
57. P – 10e Somasi / Teguran Kedua / Terakhir, Surat No. 151/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;
58. P – 11 Bukti Termohon : Debitur ternyata mempunyai tunggakan hutang pula kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai Kreditur Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai penjamin pembiayaan atas nama : Mariyanti, Karti, Sri Haryani;
59. P – 12 Bukti LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
60. P – 12a Asli Surat Pernyataan dan Kesiadaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Ny. Hj. Yudianti, atas nama Luhut M. Ompusunggu, SH, tertanggal 24 Maret 2014

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10 s/d P-10.e berupa foto copy dari Foto copy, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya oleh Kuasa Termohon telah diajukan bukti surat-surat berupa fotocopy :

1. T-1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 08 /DSN-MUI /IV /2000 tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.
2. T-2 Rekening Koran Pinjaman Credit No. 1200004105 KM07 303 periode 28 /02 /2012 s/d 19/032014 Atas Nama : Rachmat Mujiono MRS,H. Soco RT. 01 / RW. 03 Slogohimo Wonogiri.
3. T-3 Daftar Nama Karyawan GORO SRI PAKUWON JATI GROUP DEPT STORE AND CONTRUCTION di Jalan Raya Slogohimo.
4. T-4 Daftar Slip Gaji Karyawan GORO SRI PAKUWON JATI GROUP DEPT STORE AND CONTRUCTION di Jalan Raya Slogohimo.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1 berupa foto copy dari Website, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pernyataan Pailit Aquo adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil permohonan pemohon tersebut maka inti pokok dari permohonan pailit oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon (PT.

BANK SYARIAH BUKOPIN) telah memohonkan agar Termohon (NY. HAJJAH YUDIANTI) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah memiliki hutang kepada Pemohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.- + Rp 93.599.303.- = Rp 2.946.343.029,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan :
- Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46, tanggal 14 Agustus 2012 Termohon : Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), margin maksimal sebesar Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Termohon : Debitur mengaku dengan sah berhutang kepada Pemohon dengan harga jual maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- (empat milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan pembayaran kembali selambat-lambatnya 66 (enam puluh enam) bulan sejak tanggal akad line facility, kedua Akta dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta;;
- Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/ KCP-BKS/VIII/2012, mempertegas kembali bahwa Termohon telah mendapatkan pembiayaan Investasi Line Facility Murabahah maksimal Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang berlangsung sampai 60 bulan sejak tanggal pencairan, harga jual Bank maksimal sebesar Rp. 4.049.628.840.- (empat milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ,

dengan plafond Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) , Margin Rp. 1.049.628.840.- (satu milyar empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) , dengan jangka waktu sampai 60 bulan sejak tanggal penarikan / sampai tanggal 15-08-2017 ;

- Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., atas Akad Pembiayaan Line Facility Murabahah tanggal 14 Agustus 2012 No. 45 berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian persediaan barang di toko baru dalam bentuk line facility Murabahah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), telah disetujui di Restrukturisasi menyangkut Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali kewajiban angsuran (Repayment Schedule), antara lain dirubah berlaku untuk jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis ;
- Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/ 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah mempertegas kembali dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan kembali antara lain dirubah yaitu akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., telah disetujui Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan Murabahah berdasarkan Akad Pencairan Pembiayaan Murabahah menjadi fasilitas pembiayaan Musyarakah, sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta

tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian persediaan (stock) barang dagangan, untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

- Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, disetujui Restrukturisasi Pembiayaan secara keseluruhan pembiayaan Murabahah menjadi pembiayaan Musyarakah, sebagai modal /penyertaan sampai sejumlah Rp. 2.852.743.726.- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang merupakan 95 % dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi Nasabah adalah Rp. 147.256.274.- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), yang merupakan 5 % dari total kebutuhan investasi, penggunaan atas fasilitas pembiayaan Al Musyarakah dari Bank dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk modal kerja pembelian persediaan (stock) barang dagangan, berlangsung untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Bahwa meskipun terhadap pinjaman tersebut telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah dimana baki debet dibayar pada saat jatuh tempo (balon payment) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero (0) ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 (empat) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang

yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud yang telah tertunggak /jatuh tempo selama 4 (empat) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

- Bahwa di samping Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (sebagai Kreditor) ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni
 - Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera beralamat di Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;.
- Bahwa oleh karena Termohon selaku Debitor nyata-nyata memiliki dua Kreditor *atau lebih dan salah satu* hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan dengan sederhana, maka permohonan Pailit atas diri Termohon yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, dimana Termohon telah membantah, dengan mendalilkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Akta, Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012 DENGAN Akta Akad Line facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa antara Akta, Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013 DENGAN Akta, Akad Line. Facility No. 45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 juga terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur (Obscuribel) dan Rancu (Ambigu) ;

- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12a ;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna meneguhkan dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah dapat dibuktikan dalil Pemohon tersebut sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan : *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya";*

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan : *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";*

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut diatas maka yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini Pemohon

adalah Kreditor atas diri Termohon dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon (Kreditor) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu siapakah Kreditor dan Debitur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan*" , sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa "*Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*";

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tersebut maka yang harus dibuktikan dalam berkas Oquo adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum utang piutang yaitu Pemohon mempunyai piutang kepada Termohon baik karena perjanjian atau karena undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa Akta Akad Line facility No. 45, tertanggal 14 Agustus 2012,yang dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN., Notaris di Jakarta, bukti P – 2a berupa Akta Pengakuan Hutang No. 46, tertanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN., Notaris di Jakarta, bukti P – 2x berupa Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia , bukti P – 2y berupa Akta perubahan jaminan fidusia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012 Notaris H. Teddy Anwar, SH., SpN, Notaris di Jakarta, bukti P – 2z berupa Akta Personal Garansi No. 205 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn. dan Bukti P – 2aa berupa

Tanda terima uang oleh Nasabah /Termohon tanggal 15 Agustus 2012, yang menyatakan telah menerima dari Bank sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sebagai pinjaman, serta bukti P – 2 berupa Bukti Rekening Giro No. Rekening 00007000107 atas nama Tugianti, H. Termohon periode 08-2012, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah memberikan pinjaman kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dimana pinjaman tersebut telah ditegaskan pula dalam bukti P – 3 Akta Akad Murabahah tertanggal 14 Agustus 2012 No. 004/DSP-LG/MRBH/KCP-BKSA/III/2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dengan jangka waktu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa Akta Addendum Akad Line Facility Murabahah, Akta No. 17 Tanggal 05 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., dan bukti P – 5a berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kewajiban Angsuran tanggal 31 Januari 2013 No. 036/BIS/BSB-JKT/I/2013, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya permohonan telah direstrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran, dan ditegaskan pula dalam bukti P – 6 berupa Akta Addendum Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 5 Maret 2013 No. 004/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup telah dilakukan perubahan jangka waktu pembiayaan yaitu akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

2. Bahwa berdasarkan bukti P – 7 berupa Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah, Akta No. 204 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., Mkn., dan bukti P – 7a berupa Surat tanggal 26 April 2003 mengenai Permohonan Restruktur Pembiayaan, serta bukti P – 7b berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas

disimpulkan bahwa terhadap hutang Termohon telah direstrukturasikan menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran, dan ditegaskan pula dalam bukti P – 8 Akad Addendum II Akad Pembiayaan Musyarakah No. 21/ADD-MSKH/BSB-SKA/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal akad addendum restrukturisasi pembiayaan, sampai dengan tanggal 22-07-2017;

- d. Bahwa berdasarkan bukti P-9 posisi Outstanding per 31 Januari 2014 , Termohon telah menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, dan berdasarkan bukti P – 9a posisi Outstanding per 28 Pebruari 2014, Termohon menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, hingga Pebruari 2014, adapun Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp 2.852.743.726.- + Rp 93.599.303.- = Rp 2.946.343.029,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d d di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terdapat perjanjian, berupa fasilitas Pembiayaan untuk Modal Kerja sehingga dalam hal ini pihak Pemohon sebagai pemberi fasilitas pembiayaan disebut sebagai Kreditor yang memiliki piutang kepada Termohon dan sebaliknya Termohon sebagai Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon sehingga berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah hak tagih/piutang milik Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan ;

hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, dan margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud sesuai bukti P-9 kenyataannya telah tertunggak selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut (bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014), maka berdasarkan fakta tersebut serta dengan merujuk pada bunyi Pasal 10 huruf a dan b Akad Line Facility No. 45 serta bunyi Pasal 11 Akta Addendum Akad Line Facility Musyarakah No. 204 dapat disimpulkan adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d huruf c di atas dengan demikian Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan atas hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti bahwa hutang Termohon tersebut berawal dari perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Line Facility Musyarakah No. 45 tanggal 14 Agustus 2012 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal 14 Agustus 2012 berikut addendum-addendumnya yang mana Termohon terbukti telah menerima uang pembiayaan tersebut dan telah dipergunakan oleh Termohon, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya tersebut, namun ternyata Termohon belum mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon meskipun telah jatuh tempo serta beberapa kali ditagih/diperingatkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dalil tentang Termohon memiliki hutang kepada Pemohon yang belum dibayar dan telah jatuh tempo telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah selain kepada Pemohon telah pula terdapat Kreditor lain yang memiliki piutang kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Pemohon mendalilkan bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga memiliki hutang kepada kreditor lain yaitu Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon, maka perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P – 11 Termohon/Debitur mempunyai tunggakan hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah per 22 Nopember 2013 kurang lebih sebesar Rp. 441.266.439.- (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai Kreditur Lain, hutang karena pembiayaan untuk Termohon sendiri maupun dalam kedudukannya sebagai penjamin pembiayaan atas nama : Mariyanti, Karti, Sri Haryani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti di atas dapat dibuktikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah telah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon atau sebaliknya Termohon memiliki hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti disamping Termohon memiliki hutang kepada Pemohon, terbukti pula Termohon memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni Bank Perkreditan Rakyat Dharma Kuwera Jl. Sersan Sadikin No. 86 A Klaten Utara, Klaten 57431, Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon (Debitur) mempunyai dua atau lebih Kreditor dan terbukti pula Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon juga telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tanggapan Termohon yang berpendapat bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 serta antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dengan Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 tanggal 14 Agustus 2012 terdapat kesamaan jaminan yang mana kesamaan-kesamaan menjadikan Permohonan Pailit menjadi Kabur (Obscurlibel) dan Rancu (Ambigu), Bahwa sesuai ketentuan Undang – undang tentang Hak Tanggungan dimungkinkan terhadap 1 (satu) sertifikat dapat dibebani dengan Hak Tanggungan lebih daru 1 (satu) kali, dengan kata lain dapat dijadikan jaminan untuk dua hutang

sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;

Menimbang, bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 salah satunya adalah harus Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon ini sebagaimana yang mohonkan Pemohon (bukti P – 12a Surat Pernyataan dan Kesiapan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Ny. Hj. Yudianti, atas nama Luhut M. Ompusunggu, SH, tertanggal 24 Maret 2014), oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Kurator tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping Kurator tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, juga harus ditunjuk Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. Dwiarto Budi Santiarso, SH. MHum. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon patut dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), jo. Pasal 70 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI:

- I. Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Termohon **NY. HAJJAH YUDIANTI**, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Mengangkat :
 - **LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-01 tanggal 14 Januari 2013 berkantor di **BOSS & PARTNERS Law Firm**, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;sebagai Kurator dalam dalam proses kepailitan ini ;
- IV. Mengangkat Sdr. **H. Dwiarso Budi Santiarto, SH. MHum.** sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini ;
- V. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 2.061.000 (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh kami : **M U J A H R I, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **T O G A R, SH MH** dan **SITI JAMZANAH, SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim - Hakim Anggota di atas dengan dibantu oleh : **IRENE A PRADATA, SH M.Hum**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri —————

oleh Kuasa Hukum Pemohon Paillit dan Kuasa Hukum Termohon Paillit:

Hakim-Hakim Anggota,



TOGAR, SH MH



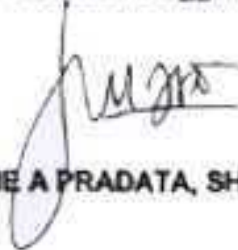
SITI JAMZANAH, S.H.M.H

Hakim Ketua,



MUJAHRI, SH

Penitera Pengganti,



IRENE A PRADATA, SH M.Hum

Perincian Biaya

1. Adminitrasi	: Rp. 50.000
- Panggilan	: Rp.2.000.000.-
- Redaksi putusan	: Rp. 5.000.-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp.2.061.000.- (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah.)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 522840 Fax (0274) 545644
 Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Syarifudin, S.H.I.
 NIM : 1520310047
 Semester : IV (Empat)
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
 Prodi : Hukum Islam (HI)
 Pembimbing I : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
 Tesis Berjudul : PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG).

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	28/03/2017	I	Bab I	
2	3/04/2017	II	Bab I	
3	5/04/2017	III	Bab I	
4	9/04/2017	IV	Bab I	
5	13/04/2017	✓	Bab II -	
6	3/05/2017	VI	Bab II - Bab V	
7	5/05/2017	VII	Revisi Bab II - Bab V	
8	8/05/2017	VIII	Perbaikan Sistematika Penulis	

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Mengetahui,
 Pembimbing I

(Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 52840 Fax (0274) 54564
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Syarifudin, S.H.I.
NIM : 1520310047
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Hukum Islam (HI)
Pembimbing II : Dr. Fathorrahman, S.Sg., M.Si.
Tesis Berjudul : PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN EKONOMI
SYARIAH (Analisis Putusan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG).

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	13-04-2017	I	Bab I	/
2	23-04-2017	II	Bab II	/
3	3-05-2017	III	Bab III - Bab V	/
4	8-05-2017	IV	Revisi bab III - Bab V	/
5	10-05-2017	V	Sistematika Penulisan	/

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Mengetahui,
Pembimbing II

(Dr. Fathorrahman, S.Sg., M.Si.)

CURRICULUM VITAE



Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H

Tempat, tgl lhr	Jagang, 17 Februari 1992
Status	Lajang
No. Hp	0857-8991-9511
E-Mail	ahmadsyariefudin@gmail.com
Facebook	https://web.facebook.com/akhmad.syariefuddin
IG	@arief_recommended
Blog	www.optinesia.com
Motto	<i>“Berjuang sekarang atau susah di usia senja”</i>

PENDIDIKAN FORMAL

1998-2004	SDN 02 DESA JAGANG LAMPUNG UTARA
2004-2007	MTs HIDAYATUL MUBTADIIN JAGANG
2007-2010	SMK N 1 KOTA BUMI LAMPUNG UTARA
2011-2015	IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
2015-2017	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENDIDIKAN NON FORMAL

2013	SEKOLAH TRAINER DAN MOTIVATOR INDONESIA
------	---

PENGALAMAN ORGANISASI

2009	ROHIS SMKN 1 KOTABUMI (BENDAHARA UMUM)
2009	OSIS SMK N 1 KOTABUMI (BENDAHARA UMUM)
2011-2012	MA'HAD LANGUAGE COMMUNITY (KETUA)
2012-2013	PUSAT INFORMASI DAN KONSELING IAIN RADEN INTAN LAMPUNG (KONSELOR SEBAYA)
2014-2015	PUSAT INFORMASI DAN KONSELING IAIN RADEN INTAN LAMPUNG (PENDIDIK SEBAYA)
2014-2015	KOMUNITAS MINAT BACA LAMPUNG (KETUA)
2014-2015	SATGAS ANTI NARKOBA BNN LAMPUNG
2013-2015	RISEF (ANGGOTA)

PRESTASI

2013	JUARA I DUTA MAHASISWA GENERASI BERENCANA BKKBN LAMPUNG
-------------	--

2014	JUARA III LOMBA PENYIAR BERITA LAMPUNG
-------------	---

KARYA TULIS

2014	Excellent Student: Trik Menjadi Mahasiswa Ideal Dan Cepat Wisuda [Buku]
-------------	--

2015	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Putusan MK No.93/PUU-X/2012 [Skripsi/Buku]
-------------	---

2017	Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No. 3/PAILIT/2014/PN.SMG (Tesis)
-------------	---